



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/70/M.SM.02.00/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Penetapan Kelas Jabatan Nasional
bagi Jabatan Fungsional Penera

08 Januari 2025

Yth. Menteri Perdagangan
di
Tempat

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor : KP.00/241/M-DAG/SD/04/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Penyampaian Usulan Penyesuaian Kelas Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan secara Nasional, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pasal 99 ayat (3) huruf s Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyatakan bahwa Instansi Pembina Jabatan Fungsional memiliki tugas menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan;
2. Kementerian Perdagangan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penera mengajukan usulan kelas jabatan nasional bagi Jabatan Fungsional Penera yang telah diundangkan melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan; dan
3. Usulan kelas jabatan bagi Jabatan Fungsional tersebut di atas telah disampaikan sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 39 Tahun 2013 dan telah dilakukan analisis serta penyesuaian sesuai ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

Berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, dengan ini disampaikan penetapan kelas jabatan nasional bagi Jabatan Fungsional Penera. Penetapan kelas jabatan nasional dimaksud dijadikan **acuan** bagi Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Penera.

Penetapan kelas jabatan dan nilai jabatan bagi Jabatan Fungsional Penera di lingkungan Instansi Pengguna, sebagaimana tercantum pada Lampiran, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengisian kebutuhan jabatan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250102JMZK



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam persetujuan hasil evaluasi jabatan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian penetapan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Rini Widyantini

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250102JMZK



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENERA SECARA NASIONAL

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	14	0	
2	12	91	
3	10	253	
4	8	223	
5	9	22	
6	8	71	
7	7	99	
	Total	759	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250102JMZK



DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, UNIT ORGANISASI, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI SECARA NASIONAL

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
1	Penera Terampil	Kementerian Perdagangan	7	14	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Demak		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan		3	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara		3	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri		3	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Landak		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta		4	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang		3	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Serang		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo		1	
		Pemerintah Daerah Kota Bandung		2	
		Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru		1	
		Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin		2	
		Pemerintah Daerah Kota Cimahi		1	
		Pemerintah Daerah Kota Cirebon		1	
		Pemerintah Daerah Kota Depok		2	
		Pemerintah Daerah Kota Malang		1	
		Pemerintah Daerah Kota Padang		2	
		Pemerintah Daerah Kota Palu		2	
		Pemerintah Daerah Kota Pasuruan		2	
		Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru		1	
		Pemerintah Daerah Kota Probolinggo		1	
		Pemerintah Daerah Kota Salatiga		1	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250102JMZK



NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
1	Penera Terampil	Pemerintah Daerah Kota Surabaya	7	1	
		Pemerintah Daerah Kota Surakarta		2	
		Pemerintah Daerah Kota Tangerang		1	
		Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya		3	
2	Penera Mahir	Kementerian Perdagangan	8	13	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas		3	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Demak		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Paser		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong		1	
		Pemerintah Daerah Kota Balikpapan		4	
		Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh		1	
		Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru		2	
		Pemerintah Daerah Kota Batu		1	
		Pemerintah Daerah Kota Bitar		1	
		Pemerintah Daerah Kota Cilegon		2	
		Pemerintah Daerah Kota Depok		1	
		Pemerintah Daerah Kota Kupang		2	
		Pemerintah Daerah Kota Magelang		2	
		Pemerintah Daerah Kota Medan		1	
Pemerintah Daerah Kota Padang	1				
Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang	4				
Pemerintah Daerah Kota Pontianak	2				
Pemerintah Daerah Kota Probolinggo	1				
Pemerintah Daerah Kota Samarinda	2				
Pemerintah Daerah Kota Semarang	1				
Pemerintah Daerah Kota Solok	1				
Pemerintah Daerah Kota Surakarta	2				
Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang	1				
Pemerintah Daerah Kota Tegal	1				
Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta	1				
3	Penera Penyelia	Kementerian Perdagangan	9	2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Serang		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo		1	
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya	1				

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250102JMZK



NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
3	Penera Penyelia	Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara	9	1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung		1	
		Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh		1	
		Pemerintah Daerah Kota Balikpapan		1	
		Pemerintah Daerah Kota Kupang		2	
		Pemerintah Daerah Kota Padang		1	
		Pemerintah Daerah Kota Semarang		1	
4	Penera Ahli Pertama	Kementerian Perdagangan	8	34	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan		3	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Batang		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi		9	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Blora		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Garut		3	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang		3	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru		3	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya		3	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur		1	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250102JMZK



NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
4	Penera Ahli Pertama	Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang	8	1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Malang		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Palangka Raya		4	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang		3	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Siak		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Subang		5	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi		3	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang		6	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya		3	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-una		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo		2	
		Pemerintah Daerah Kota Bandung		1	
		Pemerintah Daerah Kota Batam		2	
		Pemerintah Daerah Kota Bontang		1	
		Pemerintah Daerah Kota Cilegon		1	
		Pemerintah Daerah Kota Cirebon		1	
		Pemerintah Daerah Kota Depok		1	
		Pemerintah Daerah Kota Depok		1	
		Pemerintah Daerah Kota Kupang		4	
		Pemerintah Daerah Kota Mataram		2	
		Pemerintah Daerah Kota Padang		4	
		Pemerintah Daerah Kota Palembang		4	
		Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang		2	
		Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru		1	
		Pemerintah Daerah Kota Pematang Siantar		1	
		Pemerintah Daerah Kota Pontianak		1	
		Pemerintah Daerah Kota Pontianak		1	
		Pemerintah Daerah Kota Salatiga		1	
		Pemerintah Daerah Kota Semarang		1	
		Pemerintah Daerah Kota Surabaya		1	
		Pemerintah Daerah Kota Surakarta		2	
		Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan		1	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250102JMZK



NO.	NAMA JABATAN FUNSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
4	Penera Ahli Pertama	Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya	8	2	
		Pemerintah Daerah Kota Tual		2	
5	Penera Ahli Muda	Kementerian Perdagangan	10	41	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas		5	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi		3	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon		3	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Ende		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang		3	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Malang		3	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto		3	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan		3	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang		1	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250102JMZK



NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
5	Penera Ahli Muda	Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie	10	1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Serang		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri		1	
		Pemerintah Daerah Kota Balikpapan		1	
		Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh		2	
		Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung		1	
		Pemerintah Daerah Kota Bandung		4	
		Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin		3	
		Pemerintah Daerah Kota Batam		4	
		Pemerintah Daerah Kota Batu		1	
		Pemerintah Daerah Kota Bekasi		4	
		Pemerintah Daerah Kota Bogor		1	
		Pemerintah Daerah Kota Cilegon		1	
		Pemerintah Daerah Kota Cirebon		1	
		Pemerintah Daerah Kota Depok		1	
		Pemerintah Daerah Kota Gorontalo		2	
		Pemerintah Daerah Kota Jambi		6	
		Pemerintah Daerah Kota Kediri		2	
		Pemerintah Daerah Kota Kendari		1	
		Pemerintah Daerah Kota Kupang		6	
		Pemerintah Daerah Kota Lubuk Linggau		1	
		Pemerintah Daerah Kota Magelang		2	
		Pemerintah Daerah Kota Malang		1	
		Pemerintah Daerah Kota Manado		2	
		Pemerintah Daerah Kota Medan		4	
		Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan		1	
		Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam		2	
		Pemerintah Daerah Kota Palembang		6	
		Pemerintah Daerah Kota Palu		2	
		Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang		6	
		Pemerintah Daerah Kota Pasuruan		1	
		Pemerintah Daerah Kota Prabumulih		1	
		Pemerintah Daerah Kota Pekalongan		2	
		Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru		3	
		Pemerintah Daerah Kota Samarinda		1	
		Pemerintah Daerah Kota Semarang		10	
		Pemerintah Daerah Kota Sibolga		2	
		Pemerintah Daerah Kota Sukabumi		1	
		Pemerintah Daerah Kota Surabaya		2	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250102JMZK



NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
5	Penera Ahli Muda	Pemerintah Daerah Kota Tangerang	10	4	
		Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan		3	
		Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang		3	
		Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya		3	
		Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta		1	
6	Penera Ahli Madya	Kementerian Perdagangan	12	44	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Banda Aceh		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Garut		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Malang		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung		1	
		Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung		1	
		Pemerintah Daerah Kota Bandung		1	
		Pemerintah Daerah Kota Bogor		2	
		Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi		2	
		Pemerintah Daerah Kota Cilegon		1	
		Pemerintah Daerah Kota Jambi		1	
		Pemerintah Daerah Kota Kupang		3	
		Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara		1	
		Pemerintah Daerah Kota Magelang		1	
		Pemerintah Daerah Kota Manado		5	
		Pemerintah Daerah Kota Medan		1	
		Pemerintah Daerah Kota Padang		2	
		Pemerintah Daerah Kota Palu		1	
		Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru		1	
		Pemerintah Daerah Kota Semarang		4	
		Pemerintah Daerah Kota Serang		1	
		Pemerintah Daerah Kota Surabaya		1	
		Pemerintah Daerah Kota Tangerang		1	
		Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya		2	
		Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta		1	
7	Penera Ahli Utama	-	14	0	
Jumlah				759	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250102JMZK



TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL PENERA SECARA NASIONAL

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1~9)		Faktor 2 Pengawasan (Level 1~5)		Faktor 3 Pedoman (Level 1~5)		Faktor 4 Kompleksitas (Level 1~6)		Faktor 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1~6)		Faktor 6 Hub. Pribadi (Level 1~4)		Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4)		Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3)		Faktor 9 Lingk. Kerja (Level 1~3)	
1	Penera Terampil	7	705	3	350	2	125	1	25	2	75	2	75	1	10	1	20	2	20	1	5
2	Penera Mahir	8	850	3	350	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	2	50	2	20	1	5
3	Penera Penyelia	9	1350	4	550	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	2	20	1	5
4	Penera Ahli Pertama	8	1220	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	2	20	1	5
5	Penera Ahli Muda	10	1685	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
6	Penera Ahli Madya	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
7	Penera Ahli Utama	14	2820	7	1250	4	450	4	450	4	225	4	255	3	60	3	120	1	5	1	5

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250102JMZK